

PENEGAKAN HUKUM DALAM PERISTIWA RUNTUHNYA JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA DI TINGKAT PENYIDIKAN

Rengga Puspo Saputro¹, Prija Djatmika², Sarosa Hamongpranoto³
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

ABSTRAKSI

Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Reskrim Polres Kutai Kartanegara dalam peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara berdasarkan hasil penyidikan, tentang barang siapa karena kealpaannya/kelalaiannya mengakibatkan matinya orang dan luka (Pasal 359 jo 360 KUHP) yakni Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekitar jam 16.25 Wita di Jln. Wolter Minginsidi kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Akibat runtuhnya Jembatan tersebut mengakibatkan meninggalnya orang lain sebanyak 24 orang serta mengakibatkan orang menjadi luka-luka sebanyak 37 orang. Kronologis tersebut diperoleh tim penyidik setelah mendapatkan keterangan beberapa saksi yang mengalami, melihat dan mengetahui saat kejadian tersebut. Dengan penuh rasa kesadaran bahwa dalam peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Kutai Kartanegara belum mempunyai pengetahuan dan referensi tentang pekerjaan konstruksi seperti bangunan Jembatan Kutai Kartanegara sehingga kesulitan dalam menentukan faktor penyebab runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, tuntutan akan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara harus benar-benar menjadi salah satu upaya sinergi untuk memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat.

Kata Kunci : penegakan hukum, jembatan Kutai Kartanegara, penyidikan

ABSTRACT

Based on the results of the study conducted by law enforcement investigators Satuan Reskrim Polres Kutai Kartanegara in the event of the collapse of the bridge Kutai Kartanegara based on the results of the investigation, about anyone because of negligence / negligence resulting in the death of people and wounded (Pasal 359 jo 360 KUHP) The collapse of the bridge Kutai Kartanegara that occurred on Saturday, 26 November 2011 at around 16:25 pm in Jln. Wolter Minginsidi kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. As a result of the collapse of the bridge resulted in the death of another person as many as 24 people and resulted in people being injured as many as 37 people. Kronologis obtained investigating team after getting a description of some of the witnesses were experiencing, seeing and knowing. With a sense of awareness that in the event of the collapse of the bridge Kutai Kartanegara by investigator Satuan Reskrim Polres Kutai Kartanegara not have the knowledge and resources about construction work such as building bridge Kutai Kartanegara so the difficulty in determining

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

² Pembimbing I, Dosen Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

³ Pembimbing II, Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mulawaraman

the causes of the collapse of the bridge Kutai Kartanegara. Therefore, the demand for the enforcement of the law by police officers on bridge collapse incident Kutai Kartanegara should really be one of the synergies to provide a sense of justice to the people.

Key Words: law enforcement, Kutai Kartanegara Bridge, investigation

PENDAHULUAN

Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil atau juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dimana disebutkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain⁴.

Penyelenggaraan jasa konstruksi nasional harus mempunyai keandalan dan profesional untuk berdaya saing mewujudkan jasa konstruksi yang kokoh dan mampu mewujudkan pekerjaan konstruksi yang lebih efisien, efektif, dan berkualitas dimana antara penyedia jasa baik yang berskala kecil, menengah dan besar saling membangun kemitraan guna memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan kegiatan konstruksi yang selalu menitik beratkan pada aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan supaya mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang telah direncanakan.

Akan tetapi, dalam kenyataannya yang sering dijumpai tidak banyak bangunan atau infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, dan gedung yang dibangun tenaga ahli konstruksi di Indonesia mengalami kegagalan bangunan. Fenomena yang paling muktahir adalah runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara pada tanggal 26 Nopember 2011.

Jembatan yang seharusnya berfungsi sebagai prasarana untuk pergerakan arus lalu lintas, agar dapat memberi pelayanan terhadap perpindahan kendaraan dari suatu tempat ketempat lain dengan waktu yang sesingkat mungkin dengan persyaratan Nyaman dan Aman (Comfortable and Safe). Akan tetapi apabila konstruksi jembatan yang dibangun secara tidak profesional maka dapat menyebabkan tidak berfungsinya jembatan tersebut.

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 butir ke 8 yang dimaksud dengan Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara

⁴ Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang *Jasa Konstruksi*

keseluruhan maupun sebagian dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/ atau pengguna jasa.

Hal tersebut diperkuat juga dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia Pasal 34, dimana definisi Kegagalan Bangunan adalah merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau keselamatan umum, sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi⁵.

Namun untuk mendapatkan faktor penyebab konstruksi tidaklah mudah, karena kadangkala sumber penyebab kegagalan konstruksi sendiri merupakan akumulasi dari berbagai faktor. Sumber kegagalan konstruksi seringkali dipengaruhi oleh faktor alam dicontohkan sebagai kegagalan yang terjadi akibat perubahan dinamik dari alam, seperti letusan gunung berapi, banjir, gelombang laut, dan perilaku manusia juga berperan signifikan.

Pada hakekatnya, kegagalan bangunan ditinjau dari sisi waktu periodenya dapat dilihat dari setelah pekerjaan konstruksi diserahkan terakhir kalinya atau Final Hand Over (FHO), sedangkan bila ditinjau dari substansi pekerjaan maka kegagalan bangunan dapat dilihat setelah terjadi ketidakfungsian baik sebagian atau seluruhnya atas hasil pekerjaan konstruksi dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja.

Ditambahkan dalam Pasal 36 ayat 1 bahwa kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten di bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian yang objektif, yang harus dibentuk dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.

Fakta di lapangan, masih sering dijumpai kasus dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sering menyimpang dari aturan yang semestinya, terhadap kasus penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang diangkat ke ranah hukum. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang periode terjadinya atau substansi atas kejadian kegagalan pada pekerjaan konstruksi itu sendiri sehingga sering keliru dalam penerapan hukumnya. Ketika permasalahan penyelenggaraan konstruksi dan jelas-jelas terjadi pada periode kontrak (belum diserahkan terakhir, FHO) yang seharusnya diselesaikan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak tetapi faktanya didakwa mendasarkan hukum pidana bahkan sering dikenakan tindak pidana khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

⁵ Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang *Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*.

Melihat kenyataan diatas, penegakan hukum terhadap peristiwa runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara tanggal 26 Nopember 2011 yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik dari Kepolisian, Kejaksaan dan kehakiman guna terwujudnya rasa keadilan terhadap masyarakat.

Dalam pandangan lain bahwa proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin⁶, adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara sendiri dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT. Utama Karya sekitar tahun 1995 dengan nilai anggaran + Rp. 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh milyar rupiah) telah diserahterimakan akhir pekerjaan konstruksinya (Final Hand Over/FHO) kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada bulan September tahun 2001. Jika runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara pada bulan Nopember 2011 dikaitkan dengan kegagalan bangunan tentunya PT. Utama Karya selaku kontraktor pertama pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara belum bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia.

Hal tersebut dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 (sepuluh) tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (Final Hand Over/FHO).

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Reskrim Polres Kutai Kartanegara dalam peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, bahwa Satuan Reskrim Polres Kutai Kartanegara telah melakukan kegiatan penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Laporan Polisi nomor : LP/770/XI/2011/KALTIM/RES KUKAR tanggal 26 November 2011 tentang barang siapa karena kealpaannya/kelalaiannya mengakibatkan matinya orang dan luka (Pasal 359 jo 360 KUHP) yakni Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26

⁶ Ishaq; 2009; *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*; Sinar Grafika; Jakarta; halaman 244.

November 2011 sekitar jam 16.25 Wita di Jln. Wolter Minginsidi kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat 1 point c disebutkan bahwa "Laporan Hasil Penyelidikan atas dasar Laporan Polisi dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan peningkatan kegiatan menjadi penyidikan dalam hal hasil penyelidikan telah menemukan informasi atau keterangan yang cukup untuk menentukan perkara yang diselidiki adalah Tindak Pidana". Oleh karena itu, melalui proses gelar perkara pada tanggal 2 Desember 2011 penyidik telah meningkatkan proses penyelidikan runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara ke proses penyidikan dan telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan : Sp. Sidik/237/XII/2011/Reskrim, tanggal 02 Desember 2011.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik oleh Tim Pidkor Satuan Reskrim Polres Kutai Kartanegara dalam peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, bahwa berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor : SP Sidik/237/XII/2011/Reskrim, tanggal 02 Desember 2011, adapun kronologis sebelum peristiwa runtuhnya jembatan tersebut dari hasil penyidikan terhadap peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, bahwa pada saat sebelum runtuhnya jembatan Kutai kartanegara sedang ada kegiatan pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara yang di laksanakan oleh kontraktor pelaksana PT. Bukaka Teknik Utama, yang mana karyawan PT. Bukaka Teknik Utama pada saat itu sedang melakukan kegiatan penyesuaian Chamber lantai Jembatan dengan cara mengejack/mendongkrak chamber lantai Jembatan dengan menggunakan alat berupa hydraulic jack sebanyak 2 (dua) unit, Power pack sebanyak 2 (dua) unit dan hand cran dengan maksud untuk mengangkat chamber lantai jembatan untuk mengembalikan ke posisi awal.

Pelaksanaan pengejackan/pendongkrakan chamber lantai Jembatan di laksanakan pada hari sabtu tanggal 26 November 2011 pertama dari sisi ilir/sebelah kanan dari arah Tenggarong tepatnya di tengah bentang Jembatan setinggi 15 cm dengan menggunakan alat hydraulic jack dan power pack, kemudian siang harinya karyawan PT. Bukaka Teknik Utama melakukan pengejackan/pendongkrakan chamber lantai Jembatan di arah hulu/sebelah kiri dari arah Tenggarong di posisi tengah bentang jembatan setinggi 10 cm, pada saat jack/dongkrak berada di posisi 10 cm, saksi (Haidir) mengecangkan baut chamber lantai Jembatan, setelah baut di kencangkan tiba-tiba kedengaran suara ada yang putus di bagian atas hanger/kabel penggantung pas di posisi karyawan PT. Bukaka Teknik Utama mengejack/mendongkrak chamber lantai Jembatan, dan dalam hitungan detik Jembatan Kutai Kartanegara runtuh ke dalam sungai

bersama-sama dengan para pekerja dan seluruh kendaraan roda 2 dan roda 4 yang sedang melintas di atas Jembatan tersebut.

Kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara tersebut, di lelang bulan Agustus 2011 yang di ikuti oleh 5 (lima) perusahaan antara lain : PT. Bukaka Teknik Utama; PT. Agrabudi; PT. Arkindo; PT. Indonusa Harapan Masa; dan PT. Anugrah Lahan Baru.

Kemudian yang di tetapkan sebagai pemenang lelang untuk kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara adalah PT. Bukaka Teknik Utama berdasarkan surat penunjukan penyedia jasa tanggal 06 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh H. Yoyo Suryana, ST.,MT selaku KPA (Kuasa Pengguna anggaran).

Dalam kenyataannya kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai kartanegara tidak memiliki gambar perencanaan yang di buat oleh konsultan perencana, melainkan tersangka (selaku PPTK) yang menentukan pekerjaan yang harus di kerjakan oleh pihak kontraktor yang mana awalnya tersangka (selaku PPTK) di hubungi lewat telpon oleh Ketua Panitia lelang dan KPA untuk membuat HPS dan gambar, setelah itu mencari data-data untuk bisa membuat HPS dan Gambar, setelah tersangka (selaku PPTK) selesai membuat HPS dan gambar kemudian tersangka (selaku PPTK) ajukan ke KPA untuk di tanda tangani, setelah itu tersangka (selaku PPTK) serahkan ke panitia lelang, selanjutnya panitia lelang yang memproses pelaksanaan lelang.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara untuk tahun 2011 "tidak ada gambar rencana" yang di buat oleh konsultan perencana, dan yang menjadi dasar atau acuan tersangka (selaku PPTK) untuk kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara tahun 2011 adalah membuat referensi sendiri yang di ambil dari gambar AS BUILT DRAWING (Gambar yang sudah terbangun) dari PT. Utama Karya, yang di buat setelah pelaksanaan pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara pada tahun 2001 dan saran dari PT. Indenes Utama Eengineering Consultan selaku konsultan perencana pada tahun 2006, sedangkan dari PT. Indenes Utama Engineering Consultant tidak pernah membuat perencanaan untuk kegiatan pemeliharaan Tahun anggaran 2011 namun pada tahun 2006 pernah mengusulkan item pekerjaan untuk pemeliharaan Jembatan yang di perlukan antara lain : (1) Pengencangan baut-baut clamp; (2) Adjuisting hanger untuk mendapat chamber yang sesuai rencana; (3) Penggantian atau pemasangan Expantion joint; dan (4) Pengisian pasir pada angkur block untuk menambah berat block angkur.

Pada tahun 2006 pernah di lakukan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara dengan konsultan perencana dari PT. Indinese Utama Engineering Consultant kemudian pada tahun 2007 di lakukan pekerjaan fisik dengan jenis pekerjaan pengisian pasir di angkur/abutan dan

pemasangan Expantiont joint dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.700.000.000.00,- (Satu Milliar tujuh ratus juta rupiah).

Pada saat pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai kartanegara tidak ada konsultan pengawas yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara. Karena CV. Archita Triastama Konsultan yang di tetapkan sebagai pemenang lelang untuk "Konsultan Pengawas" belum memiliki kontrak kerja antara CV. Archita Triastama Konsultan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga CV. Archita Triastama Konsultan belum terikat dengan pengawasan untuk kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara.

Adapun dasar PT. Bukaka Teknik Utama melaksanakan kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara berdasarkan surat perjanjian kerja konstruksi (kontrak) No. 2285/630/DPU/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.798.000.000.00,- (Dua Milliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang di tanda tangani oleh untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan untuk dan atas nama PT. Bukaka Teknik Utama (selaku Direktur).

Setelah PT. Bukaka Teknik Utama di tetapkan selaku pemenang lelang kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara dan setelah penanda tangan surat perjanjian kerja konstruksi (kontrak) No : 2285/630/DPU/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011, maka pihak PT. Bukaka Teknik Utama memulai melaksanakan pekerjaan persiapan yakni pada tanggal 20 Oktober 2011 pihak kontraktor mengikuti pelaksanaan rapat PCM (Pree Konstruksi meeting) bersama-sama dengan unsur dari konsultan pengawas yang di laksanakan oleh Dinas PU Kab. Kukar selaku pemilik pekerjaan, setelah pelaksanaan rapat PCM selanjutnya di adakan pengukuran, setelah itu hasil pengukuran di analisa oleh pihak PT. Bukaka Teknik Utama, dan dari hasil pengukuran geometrik Jembatan di bandingkan dengan kondisi Jembatan saat ini dengan kondisi Jembatan tahun 2001 dan 2006 dan 2011, hasilnya ***Chamber bentang tengah turun sekitar 76 Cm dari posisi awal (2001), salah satu Clamp kabel penggantung/hanger ada yang bergeser.***

Setelah di lakukan rapat PCM (Pree construction Meeting) di laksanakan selanjutnya dari PT. Bukaka Teknik Utama melakukan pekerjaan survey inspeksi lapangan yang mana tersangka (M. Shariar Fahrurrozi, ST) memberikan pekerjaan tersebut kepada Sdr. Chaiul dan Sdr. Waridi yang bukan karyawan PT. Bukaka Teknik Utama dengan hasil survey inspeksi lapangan adalah sebagai berikut : (1) Penurunan terbesar rangka chamber 760 mm pada bagian tengah Jembatan; (2) Adanya perbedaan elevasi rangka jembatan sebesar 82 mm pada bagian ekor Jembatan; (3)

Defiasi (penyimpangan) kelurusan tower/pilon maksimum sebesar 170 mm; dan (4) Kekencangan hanger ada beberapa kondisi hanger yang tidak terlalu tegang (bisa digoyang).

Setelah di lakukan Survey inspeksi hasil survey inspeksi tersebut di serahkan ke Tersangka (selaku PPTK), dan tindak lanjut hasil survey inspeksi tersebut dari PT. Bukaka Teknik Utama akan melakukan analisa tehnik/Enginnering terhadap hasil survey inspeksi tersebut.

Seharusnya hasil analisa tehnik/engineering tersebut seyogyanya Tersangka (M. Shariar Fahrurrozi, ST) wajib menyampaikan ke Dinas PU Kab. Kukar dalam hal ini ke Tersangka (selaku PPTK) untuk di ketahui dan di setujui, namun hasil analisa tehnik/engineering oleh Project Manager tidak menyampaikan ke Tersangka (selaku PPTK) sehingga tersangka (selaku PPTK) belum mengetahui apa hasil analisa engineering dan belum menyetujui hasil analisa engineering tersebut dan juga tidak mengetahui apa metode pekerjaan yang akan di laksanakan oleh pihak PT. Bukaka teknik Utama.

Pada tanggal 13 Oktober 2011 PT. Bukaka Teknik Utama pernah mengajukan surat ke Dinas PU Kab. Kukar perihal ijin ***buka tutup jalan dan permintaan outlet power listrik PLN***, kemudian dari Dinas PU Kab. Kukar menindak lanjuti surat tersebut dengan mengirim surat ke Bupati kukar sesuai dengan surat Nomor : 2442/630/DPU/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, perihal permohonan izin buka tutup lalu lintas dan pelepasan lampu sementara di Jembatan Kutai Kartanegara serta pembukaan outlet power listrik PLN, 1 (satu) lembar surat nomor : 2442/630/DPU/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, perihal permohonan ijin buka tutup lalu lintas dan pelepasan lampu sementara di Jembatan Kutai Kartanegara, kemudian dari pemerintah Kab. Kukar melaksanakan rapat yang dipimpin oleh Asisten II di ruang dan di hadiri oleh instansi terkait dan dari hasil rapat belum ada keputusan mengenai buka tutup jalan di Jembatan Kutai kartanegara.

Ironisnya PT. Bukaka Teknik Utama dalam melaksanakan kegiatan mulai dari penyetingan dudukan jack/dongkrak sampai pelaksanaan pengejackan chamber lantai Jembatan di laksanakan oleh karyawan PT. Bukaka Teknik Utama yakni Makmur Azis (Alm) selaku Site Manager tidak memiliki sertifikasi keahlian di bidang Jembatan dan juga para pekerja lepas yang di rekrut oleh PT. Bukaka Teknik Utama untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara adalah pekerja yang tidak memiliki keahlian di bidang Jembatan. Makmur Azis (Alm) selaku Site Manager di rekrut oleh Tersangka (M. Syahriar Fahrurrozi) selaku Manager Project namun sebelumnya Tersangka (M. Syahriar Fahrurrozi) sudah mengetahui kalau Makmur Azis (Alm) memang tidak memiliki sertifikasi keahlian di bidang Jembatan namun tetap di rekrut dengan alasan sudah memiliki pengalaman dan berkualitas.

Pada saat PT. Bukaka Teknik Utama melaksanakan kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara Tersangka (M. Syahriar Fahrurrozi) selaku Manager Project tidak melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, kemudian Tersangka (selaku KPA) juga tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya selaku KPA yakni tidak melakukan pengawasan di lapangan dan Tersangka (selaku PPTK) juga tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya selaku PPTK karena tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara langsung pada saat karyawan PT. Bukaka Teknik utama melakukan kegiatan pengejakan/pondongkrakan chamber lantai Jembatan.

Penyebab runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara menurut keterangan para ahli bahwa faktor penyebab runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 adalah telah terjadi overstres pada komponen PIN pada sistem clamping batang penggantung ke kabel utama. Overstres terjadi karena adanya kegiatan re-cambering di sekitar tengah bentang Jembatan. Akibat kegiatan tersebut terjadi pemusatan beban pada satu batang penggantung dan diduga melampaui kekuatan sistem clampingnya, sehingga berakibat pada patahnya PIN secara tiba-tiba pada clamping tersebut. Selain PIN pada satu clamping di sekitar tengah bentang Jembatan tersebut patah, maka clamping di samping-sampingnya mengambil alih beban yang sudah tidak tertahan lagi oleh clamping yang gagal tadi. Selain itu clamping disamping-samping clamping yang gagal tadi juga akan menerima beban tambahan lagi akibat beban kejut, sebagai akibatnya beban pada clamping di samping-samping clamping yang gagal pertama tadi akan menjadi sangat besar dan diduga melampaui batas kekuatannya sehingga patah. Mekanisme demikian seterusnya merembet keseluruh batang penggantung sepanjang bentang Jembatan, sehingga rangka baja Jembatan runtuh secara keseluruhan.

Akibat runtuhnya Jembatan Kutai kartanegara mengakibatkan meninggalnya orang lain sebanyak 24 (dua) puluh empat orang yang sudah di temukan dan di perkirakan masih ada orang yang belum di temukan dan masih berada di sungai Mahakam serta mengakibatkan orang menjadi luka-luka sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang akibat dari kelalaian (Pasal 359 jo 360 KUHP) yang di lakukan oleh Tersangka H. Yoyo Suryana, ST.,MT (Alm) (selaku Kuasa Pengguna Anggaran), H. Setiono, ST (selaku PPTK) dan M. Syahriar Fahrurrozi, ST (Kepala Bagian Departemen Engineering Unit Usaha Jembatan PT. Bukaka Teknik Utama). Dan telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, dari hasil penyidikan tim penyidik telah mendapatkan keterangan beberapa saksi yang melihat dan mengetahui saat kejadian, maupun saksi yang mengalami peristiwa tersebut sejumlah 63 orang, diantaranya yang terkait dengan pekerjaan pemeliharaan jembatan Kutai kartanegara, pengguna jalan, maupun dari instansi terkait.

Hasil Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penyitaan No. : Sp.sita/249/XI/2011/Reskrim tanggal 28 November 2011, telah dilakukan penyitaan barang bukti/ Sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 28 November 2011. Telah dilakukan penyitaan lagi dengan surat perintah penyitaan Nomor : Sp.sita/274/XII/2011/Reskrim tanggal 02 Desember 2011, telah dilakukan penyitaan barang bukti.

Selain itu, dilakukan penyitaan lagi berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sp.sita/06/I/2012/Reskrim, tanggal 03 Januari 2012, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa: (1) 1 (satu) buah surat perjanjian kerja kontruksi (kontrak) Nomor : 2285/630/DPU/X/2011, Tanggal 11 Oktober 2011; (2) 1 (satu) buah surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pelaksana teknis (PPK), Nomor : 335/800/III/2011 tentang Penunjukan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) kegiatan APBD Tahun anggaran 2011, tanggal 21 Maret 2011; (3) 1 (satu) lembar surat nomor : 2442/630/DPU/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, perihal permohonan ijin buka tutup lalu lintas dan pelepasan lampu sementara di jembatan Kutai Kartanegara; (4) 1 (satu) bandel Notulen Rapat Nomor : 600-369/Bang II tanggal 24 Oktober 2011; (5) 1 (satu) bandel Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, tahun anggaran 2011; (6) 1 (satu) bandel rencana anggaran biaya pekerjaan perencanaan teknis abutmant jembatan Kutai Kartanegara yang di buat oleh konsultan perencanaan PT. Indenes Utama Engineering consultan tahun 2006; (7) 1 (satu) bandel laporan akhir Monitoring Stabilitas jembatan Kutai Kartanegara yang di buat oleh PT. Indenes Utama Engineering consultan tahun 2006; (8) 1 (satu) bandel gambar hasil prodac PT. Indenes Utama Engineering consultan tahun 2006; dan (9) 2 (dua) lembar RAB untuk pemeliharaan jembatan dari PT. Hutama karya.

Untuk berkas perkara runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara tersebut, adapun tersangkanya yakni : H. Yoyo Suryana, ST.,MT (Alm) (selaku Kuasa Pengguna Anggaran), H. Setiono, ST (selaku PPTK) dengan nomor berkas perkara : BP/02/I/2012/Reskrim tanggal 11 Januari 2012, dan M. Syahriar Fahrurrozi, ST (Kepala Bagian Departemen Engineering Unit Usaha Jembatan PT. Bukaka Teknik Utama) dengan nomor berkas perkara : BP/08/I/2012/Reskrim tanggal 11 Januari 2012, telah diserahkan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara ke Kejaksaan Negeri Tenggarong pada tanggal 08 Februari 2012.

Pada hari selasa tanggal 24 April 2012, Kejaksaan Negeri Tenggarong telah melakukan persidangan pertama untuk Kasus Jembatan Kukar di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan tersangka tersebut diatas, dengan tuntutan hukuman dari Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pada saat persidangan terakhir pada tanggal 6 Juni 2012 di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan agenda pembacaan putusan, dan ke tiga tersangka

tersebut di Vonis selama 1 (satu) tahun Karena kelalaiannya/kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka-luka sebagaimana di atur dan di ancam hukuman sesuai dalam pasal 359 KUHP Jo Pasal 360 KUHP, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: (1) Nomor : 102/PID.B/2012/PN.Tgr tanggal 04 Juni 2012. Untuk Tsk. H. YOYO SURIANA, ST, MT Bin H. SALI AFANDI (Alm); (2) Nomor : 103/PID.B/2012/PN.Tgr tanggal 04 Juni 2012. Untuk Tsk. MUHAMMAD SYAHRIAR FAKRURROZI, ST Bin NOOR HADI; dan (3) Nomor : 104/PID.B/2012/PN.Tgr tanggal 04 Juni 2012. Untuk Tsk. H. SETIONO, ST Bin H. PONIDI.

Keberhasilan hukum dapat dilihat dari efektifnya hukum di dalam masyarakat, hukum akan efektif berjalan apabila jika hukum tersebut telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama oleh pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, aparat Kepolisian selaku penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara tidak dimungkinkan mengalami kesulitan. Hal ini diakibatkan, penyelidik atau penyidik Kepolisian harus menemukan bukti pemulaan yang cukup, apakah dalam runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara pada tanggal 26 Nopember 2011 telah terjadi tindak pidana atau tidak dan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Reskrim Polres Kutai Kartanegara dalam peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, antara lain : (1) Faktor hukum (Undang-Undang) yaitu bahwa di dalam tulisan ini yang dimaksud dengan undang-undang adalah hukum material berupa peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha pusat dan daerah yang sah dengan demikian maka undang-undang tersebut mencakup Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku di sebagian wilayah Negara dan Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah tertentu saja. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia Pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 (sepuluh) tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (Final Hand Over/ FHO); (2) Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum diantaranya keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; kurangnya referensi; kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi; belum ada kemampuan untuk menunda

pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material; dan kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Karena masyarakat Indonesia mempunyai kecerendungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

KESIMPULAN

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Reskrim Polres Kutai Kartanegara dalam peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara berdasarkan hasil penyidikan, tentang barang siapa karena kealpaannya/kelalaiannya mengakibatkan matinya orang dan luka (Pasal 359 jo 360 KUHP) yakni Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekitar jam 16.25 Wita di Jln. Wolter Minginsidi kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, menetapkan 3 Tersangka H. Yoyo Suryana, ST.,MT (Alm) (selaku KPA), H. Setiono, ST (selaku PPTK) dan M. Syahriar Fahrurrozi, ST (Kepala Bagian Departemen Engineering Unit Usaha Jembatan PT. Bukaka Teknik Utama), ke tiga tersangka tersebut di Vonis selama 1 (satu) tahun, masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Nomor : No. : 102/PID.B/2012/PN.Tgr, No. : 103/PID.B/2012/PN.Tgr, dan No. : 104/PID.B/2012/PN.Tgr. Akibat runtuhnya Jembatan tersebut mengakibatkan meninggalnya orang lain sebanyak 24 orang serta mengakibatkan orang menjadi luka-luka sebanyak 37 orang.,

Kronologis tersebut diperoleh tim penyidik setelah mendapatkan keterangan beberapa saksi yang mengalami, melihat dan mengetahui saat kejadian tersebut sejumlah 63 orang, diantaranya yang terkait dengan pekerjaan pemeliharaan Jembatan Kutai kartanegara, pengguna jalan, maupun dari instansi terkait serta melakukan penyitaan berdasarkan surat perintah penyitaan No. : Sp.sita/249/XI/2011/ Reskrim, No. :Sp.sita/274/XII/ 2011/Reskrim, dan No : Sp.sita/06/I/2012/Reskrim.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Reskrim Polres Kutai Kartanegara dalam peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, terdiri dari beberapa faktor, yakni (1) Faktor hukum (Undang-Undang); (2) Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) Faktor

sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dengan penuh rasa kesadaran bahwa dalam peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Kutai Kartanegara belum mempunyai pengetahuan dan referensi tentang pekerjaan konstruksi seperti bangunan Jembatan Kutai Kartanegara sehingga kesulitan dalam menentukan faktor penyebab runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, tuntutan akan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara harus benar-benar menjadi salah satu upaya sinergi untuk memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Barda Satjipta Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983.

CST Kansil. *Pengaruh Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Mertokusumo. *Penemuan hukum Sebuah Pengantar*. edisi I cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Surat Kabar Harian Suara Merdeka, Semarang : 26 September 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang *Jasa Konstruksi*.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang *Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*.